

PERANAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION's (NGO'S) DALAM MEKANISME PERLINDUNGAN HAM REGIONAL ASEAN

Nuchraha Alhuda Hasnda¹, Sigit Riyanto²

INTISARI

Diantara perdebatan status NGO's didalam rezim hukum Internasional, (*Non Government Organization's*) NGO's pada periode hukum internasional modern telah berkontribusi dan partisipasi aktif untuk membangun tatanan hukum internasional khususnya dalam penegakan norma hak asasi manusia dalam mencapai efektifitasnya. Apresiasi secara perlahan diberikan oleh beberapa institusi antar pemerintah dan nasional sehingga memperkuat posisi NGO's dalam lingkungan sosial dan hubungan internasional. Kerjasama didalam struktur organisasi hadir sebagai norma kebiasaan internasional sebagai salah satu syarat dari tatanan pemerintah yang demokratis. Konsep demokrasi ini merupakan bagian dari metode penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diartikan sebagai susunan didalam tatanan pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber bahan penelitian adalah primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini digunakan juga beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, konsep, historis dan kasus. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif-komprehensif dan di analisis secara deskriptif-preskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan mekanisme HAM regional untuk mengupayakan efektifitas HAM. Partisipasi dari masyarakat sipil melalui perwakilan NGO's sebagai perwakilan masyarakat sipil berperan sebagai alternatif advokasi masyarakat sipil dalam mengupayakan perlindungan terhadap korban. NGO's juga dinilai mampu untuk menjembatani antara agenda HAM internasional dengan kepentingan regional, Regional ke Nasional, Nasional ke masyarakat maupun sebaliknya sebagai sebuah siklus/atau rantai yang saling menghubungkan karena keterbatasan kapasitas masing-masing entitas. Elastisitas yang dimiliki NGO's dan kemampuan teknikal sebagai kapasitas mereka untuk dapat membaur pada semua elemen baik lingkungan masyarakat sipil, tingkat nasional, regional dan Internasional telah menghadirkan efektivitas perlindungan HAM sebagai cita-cita universal.

Kata Kunci; Efektifitas HAM Regional Asean, Mekanisme HAM ASEAN, NGO's.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UGM 2012, Jl. Gejayan CT X No. 51 Sleman, Yogyakarta..

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGO'S) EFFECTIVENESS IN ASEAN HUMAN RIGHTS SYSTEMS

Nuchraha Alhuda Hasnda¹, Sigit Riyanto²

Abstract

Among the debates on the status of Non-Governmental Organizations (NGO's) within the international legal regime, NGO's in the period of modern international law have contributed and actively participated to establish international legal order in enforcing human rights norms in achieving their effectiveness. Appreciation is gradually given by several intergovernmental and national institutions for the benefit of NGOs in the social and international relations. Cooperation in organizational structure is present as an international customary norm as one of the requirements of a democratic governance order. The concept of democracy is part of the human rights enforcement method which is defined as the composition of the governmental order and the participation of the people.

This research is a normative research. The data used are secondary data with research material source is primary, secondary and tertiary. In this research also used several approaches, namely approach of law, concept, historic and case. The data obtained are then processed qualitatively-comprehensively and analyzed descriptively-prescriptive.

This study aims to know, understand, describe and analyze the implementation of regional human rights mechanisms to seek the effectiveness of human rights. The participation of civil society through NGO's representation as civil society representatives acts as an alternative to civil society advocacy in seeking the protection of victims. NGO's are also considered capable of bridging the international human rights agenda with regional, regional to national, national to community interests and vice versa as a cycle / or chain linking each other due to the limited capacity of each entity. NGO's elasticity and technical capability as their capacity to blend in on all elements of civil society, national, regional and international levels have presented the effectiveness of human rights protection as a universal goal.

Keywords; Human Rights Efficiency Regional Asean, ASEAN Human Rights Mechanism, NGO's,

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UGM 2012, Jl. Gejayan CT X No. 51 Sleman, Yogyakarta..

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.